

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM  
PENGELOLAAN SUMER DAYA HUTAN DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU**

**VAYKA ABDULLAH / D 101 09 648**

**ABSTRAK**

*Tulisan ini mengangkat masalah yaitu, apakah kearifan lokal masyarakat adat mendapat pengakuan dalam mengelola sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu, dan apakah hak-hak masyarakat adat mendapat perlindungan hukum dalam mengelola sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari apakah kearifan lokal masyarakat adat mendapat pengakuan dalam mengelola sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu dan untuk mengetahui dan mempelajari apakah hak-hak masyarakat adat mendapat perlindungan hukum dalam mengelola sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu.*

*Metode penulisan yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penulisan demikian adalah dengan melakukan penelitian hukum yang tertuju pada nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat, yaitu nilai-nilai hidup, nilai-nilai keseharian yang berkembang dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hasil dari pembahasan masalah ini yaitu keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mewujudkan pengakuan hukum adat, berarti hukum adat didudukkan dalam sistem hukum nasional dalam praktek, jauh dari kenyataan. TAP MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka hak pemajuan dan perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya tanah ulayat telah diakomodir dan dijadikan acuan dalam menyelesaikan konflik atas wilayah masyarakat hukum adat di kawasan hutan agar kelestarian hutan dapat tercapai. Pemanfaatan kulit kayu pohon beringin sebagai bahan baju adat (kain fuya). Untuk mendapatkan kulit kayu masyarakat tidak diperbolehkan menebang pohon beringin. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal menimbulkan respon dari masyarakat yang berimplikasi terhadap kestabilan sumber daya alam. Pada contoh kasus masyarakat Toro, faktor-faktor tersebut adalah intervensi ekonomi pasar dan dinamika politik menyangkut ketidakseimbangan hak penguasaan lahan. Keanekaragaman etnis yang ada di Toro menimbulkan persoalan-persoalan politik, yaitu persoalan yang terkait dengan sistem tenurial di Toro, yang meliputi distribusi hak pemilikan dan penguasaan lahan yang tidak berimbang antara etnis asli dan etnis pendatang, perbedaan inilah yang selalu menjadi pemicu terjadinya konflik internal di Toro, utama terkait dengan aktifitas pemanfaatan sumber daya hutan.*

**Kata Kunci : Hak Masyarakat dan Pengelolaan Hutan di TNLL**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hutan sebagai sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dasar hukum pemanfaatan hutan di Indonesia bertumpu pada makna Pasal 33 Ayat (3) yang ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bermaksud menerapkan tujuan tersebut melalui pendekatan *timber management* tetapi tidak mengakomodir suatu pola pengelolaan yang bersifat menyeluruh dalam *forest management* atau *ecosystem management* yang mengakomodasi juga aspek sosial budaya maupun ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Masyarakat hukum adat telah dan mampu mengelola sumber daya alam termasuk hutannya secara turun-temurun, melakukan aktivitas yaitu, pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, baik secara ekonomi, sosial budaya, religi, dan ekologi.<sup>1</sup> Keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mewujudkan pengakuan hukum adat, berarti hukum adat didudukkan dalam sistem hukum nasional dalam praktek, jauh dari kenyataan.

TAP MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka hak pemajuan dan perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya tanah ulayat telah diakomodir dan dijadikan acuan dalam menyelesaikan konflik atas wilayah masyarakat hukum adat di kawasan hutan agar kelestarian hutan dapat tercapai. Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dengan terbitnya Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 bahwa pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dapat segera dilakukan di daerah dan diharapkan bukan hanya pengakuan yang memberikan kepastian hukum tetapi juga diikuti dengan pemulihan hak-haknya.

Terkait dengan permasalahan di atas, jika kita lihat Prospek dan Kontribusi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Terhadap Pembangunan Daerah<sup>2</sup>. Adanya

izin dari Departemen Kehutanan dan Kebun berarti Taman Nasional boleh diubah jadi kebun. Taman Nasional Lore Lindu sebagai komoditas proyek unggulan dan janji program dicirikan antara lain yaitu, Dinamika konservasi yang stereotipe dan yang mendominasi proyek pengamanan hutan saja. Mengupas kondisi sosial dan potensi biofisik yang tidak dapat disamaratakan untuk setiap bagian Taman Nasional di standardkan melalui program Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KK-M), dilanjut dengan upaya penguatan kelembagaan LSM lokal melalui kesepakatan kemitraan dengan Taman Nasional Lore Lindu. Namun program tersebut patut diharapkan karena sampai akhir bulan Agustus 1999 belum jalan, perkiraan budget telah disebutkan yaitu \$ 28,981.

Variabel fungsi kawasan dibagi dalam 3 (tiga) kelompok :

1. kawasan budidaya kehutanan (KBK),
2. kawasan budidaya non kehutanan (KBNK), dan
3. kawasan yang dilindungi (KD). Bagi KBK dan KD, pertimbangan utama terletak pada kepentingan publik dibandingkan kepentingan pihak pengelola. Sedangkan pada KBNK berlaku sebaliknya.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kearifan lokal masyarakat adat mendapat pengakuan dalam mengelola sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu..?
2. Apakah hak-hak masyarakat adat mendapat perlindungan hukum dalam mengelola sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu..?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Hutan di Taman Nasional Lore Lindu**

Secara ekologis Sulawesi Tengah memiliki bentang alam yang rentan

---

<sup>1</sup> Abdurahman dan Wentzel, *Konsep Untuk Menyelesaikan Masalah Status Tanah Masyarakat Adat Di Indonesia*, Kawasan Hutan Pada Areal HPH dan HPHTI di Propinsi Kaltim, 1999, hlm 74

<sup>2</sup> Banjar Yulianto Laban, Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah, <http://www.tamannasionallorelindu.co.id>, diunduh tanggal 3 Nopember 2012;

bencana banjir dan erosi. Hampir 52% wilayah Sulawesi Tengah memiliki tingkat kemiringan di atas 40%, kondisi topografi daratan didominasi pegunungan dengan kontur lipatan bumi yang rumit serta lereng-lereng yang curam. Selain itu, wilayah ini memiliki tingkat curah hujan yang tinggi mencapai 800-3000 mm pertahun (April-September), serta 22 sungai besar dan sedang yang mengalir dari lipatan bumi.<sup>3</sup> Kehidupan masyarakat adat yang mampu beradaptasi dan menjaga kelestarian ekosistem hutan. Mereka memiliki kearifan tradisional yang konservatif terhadap lingkungan hidup. Kearifan tradisional ini dapat dilihat pada masyarakat adat Ngata Toro, masyarakat adat Mataue, dan masyarakat adat Dataran Lindu, yang tinggal di dalam atau berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Lore Lindu di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.<sup>4</sup>

Toro terletak sekitar 120°1' BT - 120°3'30" BT dan 1°29'30" LS - 1°32' LS, dengan luas wilayah 229,5 km<sup>2</sup> (22.950 ha) dan ketinggian rata-rata 800 m di atas permukaan laut (dpl). Toro berada dalam wilayah kecamatan Kulawi, Donggala, Sulawesi Tengah, Masyarakatnya dikenal sebagai komunitas yang memiliki pranata sosial dan kelembagaan adat yang sangat kuat. Struktur masyarakatnya telah teratur sejak zaman nenek moyang mereka. Masyarakat Toro memiliki pemerintahan sendiri yang mengatur segala bentuk kehidupan mereka, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Dalam

pemerintahannya ada tiga unsur yang sama tinggi, yaitu totua ngata, maradika, dan tina ngata. Ketiganya memiliki fungsi masing-masing tapi tidak berjalan sendiri.<sup>5</sup>

Kearifan tradisional adalah pengetahuan secara turun-temurun yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengelola lingkungan hidupnya, yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku sebagai hasil dari adaptasi mereka terhadap lingkungan yang mempunyai implikasi positif terhadap kelestarian lingkungan. Bagi masyarakat adat, kearifan tradisional merupakan peraturan yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi. Kepatuhan ini ada karena kearifan tradisional berakar kuat dalam kebudayaan mereka dan mendarah daging dalam keseharian hidup mereka. Masyarakat lokal yang hidup seimbang berdampingan dengan alam memiliki pengetahuan yang diwariskan turun-temurun tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa merusak alam. Berdasarkan hal itu, apakah masyarakat adat Toro, Mataue, dan Dataran Lindu memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan sumber daya alam dan kearifan lokal yang ada.

Kearifan lokal masyarakat Toro dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat terlihat dari kegiatan seperti dibawah ini:<sup>6</sup> Dalam aturan masyarakat adat Toro, lahan yang dapat dibuka adalah oma, terutama Oma Ngura (telah ditinggalkan 3-5 tahun), dan Oma Ntua (telah ditinggalkan 5-25 tahun) sedangkan lahan yang tidak diperkenankan untuk dibuka dengan alasan apapun adalah Pangale. Setiap yang ingin membuka lahan diwajibkan mengajukan permohonan kepada pemerintah desa

---

<sup>3</sup> Taswirul Afyatin Widjaya, dkk. Lebih lanjut :Suhardjito Didik, Khan Azis, Djatmiko Wibowo, Sirait Martua dan Evelyn Santi. Lebih lanjut :Sumadjono M, "Pengakuan Keberadaan Hutan Adat Dalam Rangka Reformasi Agraria Lokakarya Keberadaan Hutan Adat", KR Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta, 25 Maret 1999

<sup>4</sup>"Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat di Sulawesi Tengah 2002-2003". Yayasan Merah Putih. <http://www.ymp.or.id>, diunduh tanggal 3 Nopember 2012;

---

<sup>5</sup> Andrian, Handi. 2006. "Kearifan Suku Toro Menjaga Hutan". Tabloid Pesona Nusantara, Jum`at, 27 Oktober 2006. Media Indonesia, hlm 12

<sup>6</sup> Golar. "Strategi Adaptasi Masyarakat Adat Toro, Kajian Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber daya Hutan di Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah". Disertasi: Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2007, hlm 18

melalui LMA (Lembaga Masyarakat Adat) disertai alasan, lokasi yang akan dimanfaatkan dan luasan yang dibutuhkan. Setelah izin diberikan, pembukaan lahan harus didahului dengan upacara adat "Mohamele manu bula". Izin pengambilan kayu dikeluarkan apabila tujuan pemanfaatan semata-mata untuk kebutuhan domestik. Namun dalam perkembangannya, saat ini telah diperkenankan pula memanen kayu untuk bahan baku industri meubel dan kusen berskala lokal. Setelah mendapatkan izin penebangan, terlebih dahulu harus dilakukan upacara adat "Mowurera pu kau". Selain itu perlu diperhatikan bahwa kayu yang ditebang berdiameter minimal 60 cm, dan tidak melakukan penebangan di daerah Taolo, yaitu lokasi yang bertopografi miring sepanjang daerah aliran sungai dan di tempat yang rawan longsor dan erosi. Rotan yang akan dipanen harus berumur lebih dari tiga tahun, dan penetapan lokasi ditentukan oleh hasil musyawarah lembaga adat dengan memperhatikan prinsip rotasi (ra ombo). Selain itu, terdapat larangan untuk menarik rotan sepanjang daerah aliran sungai pada saat tanaman padi di sawah ataupun ladang mulai berbulir.

Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 (tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati) taman nasional terbagi ke dalam zona-zona sebagai berikut: zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona pemanfaatan intensif (non budidaya), dan zona rehabilitasi. Berdasarkan konsep ini, maka zona-zona di atas diatur sedemikian rupa secara konsentris dengan bagian tengah zona inti. Pembagian zona bersifat eksklusif (tidak mengenal wilayah enclave di dalam kawasan taman nasional).

Sementara itu, pada dasarnya, sistem zonasi pada kearifan lokal dapat digunakan sebagai pendekatan untuk sistem zonasi taman nasional. Berdasarkan pendekatan ini zonasi tidak bersifat

konsentris tetapi menyebar tergantung pada wilayah adat yang ada, serta bersifat inklusif (mengenal adanya wilayah enclave dalam kawasan taman nasional).<sup>7</sup> Masyarakat adat Desa Toro, Desa Mataue dan Dataran Lindu yang hidup di sekitar kawasan Taman Nasional Lore Lindu merupakan masyarakat lokal yang telah memiliki kearifan tradisional warisan nenek moyang mereka dalam mengelola lanskap hutan dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar tempat tinggal mereka. Kearifan masyarakat lokal ini telah ada sebelum ditetapkannya kawasan ini menjadi taman nasional. Zonasi tradisional digunakan sebagai pendekatan pada zonasi Taman Nasional Lore Lindu. Berdasarkan pendekatan ini zonasi tidak bersifat konsentris tetapi menyebar dan inklusif.<sup>8</sup>

Sistem zonasi yang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat adat dalam mengelola sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu tetap di perkenankan terutama dalam hal pemanfaatan kulit kayu pohon beringin sebagai bahan baju adat (kain fuya). Untuk mendapatkan kulit kayu masyarakat tidak diperbolehkan menebang pohon beringin demi menjaga kestabilan sumber daya alam dan perubahan hidupnya. Pada prinsipnya masyarakat adat tetap di lindungi dan mempunyai hak untuk mengelola sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

---

<sup>7</sup> Safitri A. Myrna, *Pengelolaan Hutan, Akses Masyarakat Lokal dan Perkembangan Gagasannya Dalam Kebijakan dan Perdebatan Internasional*. P3AE-UI, Jakarta, Oktober 1997, hlm 57

<sup>8</sup> Taswirul Afyatin Widjaya, Febi Muryanto, Dian Oktaveni, Alifah Rohani, Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, Konservasi Sumber daya Hutan, Teknologi Hasil Hutan, Ilmu Komputer, Institut Pertanian Bogor.  
**Sumber:** <http://images.muryanto.multiply.multiplycontent.com> **Photo :** <http://www.bi.go.id>, diunduh tanggal 21 Mei 2013

perundang-undangan yang berlaku dan diakui keberadaannya

**A. Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Hutan di Taman Nasional Lore Lindu**

Selain melalui pembukaan hutan primer (*mopangalea*), di Toro dikenal pula bentuk penguasaan lahan melalui pewarisan (*motira*) atau pembagian harta di antara keturunan. Sistem pewarisan dibedakan antara lahan yang secara aktual telah dibagikan di antara ahli waris, dan telah menjadi hak milik keluarga individual, dengan hak akses atas lahan yang belum dibagikan di antara keluarga-keluarga individual dan masih dikuasai oleh keluarga besar. Penguasaan harta oleh keluarga besar dibedakan ke dalam dua jenis penguasaan, yaitu *hampupuka* dan *hampo ompia*. *Hampupuka* adalah penguasaan oleh rumpun keluarga setingkat marga atas lahan milik bersama disebut *ataha*, yaitu berupa lahan *oma*.

Semua keluarga individual yang termasuk dalam rumpun ini berhak menggarap lahan *oma* yang dimiliki bersama. Keluarga individual dapat membuka sebidang lahan pertanian dalam *oma* ini, namun ia harus meminta ijin terlebih dulu kepada keluarga besarnya melalui keturunan yang paling dituakan. Sedangkan *hampo ompia* adalah penguasaan harta oleh rumpun keluarga yang lebih kecil, yakni hanya menjangkau hubungan antar sepupu satu nenek. Rumpun keluarga ini menguasai harta bersama yang disebut *dodoha* berupa harta dalam rumah seperti emas, dulang, dan *mbesa*.

Beraneka ragam etnis yang ada di Toro menimbulkan persoalan-persoalan politik. Persoalan dimaksud terkait dengan sistem tenurial di Toro, yang meliputi distribusi hak pemilikan dan penguasaan lahan yang tidak “berimbang” antara etnis asli (Moma) dan etnis pendatang (Rampi dan Uma).

Perbedaan terhadap hak pemilikan dan penguasaan lahan sering memicu munculnya konflik internal di Toro, utamanya terkait dengan aktifitas pemanfaatan sumber daya lahan dan hutan.

Bentuk akses terhadap lahan yang lain adalah melalui pola hubungan penyakapan (*tenancy*) dan alih kepemilikan lahan terbatas hanya bagi warga Toro, dan tidak berlaku bagi pendatang atau orang luar. Meskipun pembatasan ini tidak diatur secara formal melalui perdes, masyarakat umumnya mengetahui tentang pembatasan alih kepemilikan lahan di Toro.

Seperti diuraikan terdahulu, bahwa revitalisasi kelembagaan adat merupakan wujud respon kolektif masyarakat terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di Toro, baik disebabkan oleh faktor intervensi ekonomi pasar, maupun dinamika politik, yang berdampak pada sistem sosial masyarakat, terutama dalam berinteraksi dengan sumberdaya lahan dan hutan di Toro. Respon kolektif masyarakat Toro dikelompokkan ke dalam yaitu:

1. Respon masyarakat Toro pra-pengakuan oleh pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu; dan
2. Respon masyarakat Toro pasca pengakuan Balai Taman Nasional Lore Lindu.

Sistem kategorisasi lahan yang awalnya masih merupakan peta mental dalam alam kognitif (*cognitive map*) masyarakat, ditransfer secara visual dan grafis melalui pemetaan partisipatif. Dari sudut pandang politik, pemetaan partisipatif amat penting dilakukan. Peta merupakan gambaran simbol dan instrumen kekuasaan. Balai Taman Nasional Lore Lindu merespon positif upaya yang dilakukan oleh masyarakat Toro, dan memandang apa yang dilakukan dan diperjuangkan oleh masyarakat Toro perlu mendapatkan dukungan, dalam rangka pengembangan keterpaduan sudut pandang yang proaktif dan holistik terhadap kondisi sosial, ekologi, dan budaya masyarakat di sekitar



Taman Nasional Lore Lindu. Selain itu, secara normatif sistem kategorisasi lahan yang dibuat oleh masyarakat Toro dianggap memiliki keselarasan, walaupun tidak sama, dengan sistem pengelolaan taman nasional di Indonesia. Hal ini lebih memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu. Wujud konkrit pengakuan yang diberikan oleh pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu kepada masyarakat Toro adalah dikeluarkannya surat pernyataan, yang intinya merupakan pengakuan terhadap hak masyarakat Toro terhadap wilayah hukum adat seluas 18.000 Ha, yang awalnya diklaim sebagai bagian dari Taman Nasional Lore Lindu.

Pengakuan ini diikuti pula dengan penandatanganan piagam kesepakatan pengawasan Taman Nasional Lore Lindu, antara pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu dengan masyarakat Toro, pada tanggal 18 Juli 2000. Penandatanganan prasasti tersebut merupakan bentuk simbolik rencana legal kerja sama antara kelembagaan adat dan Balai Taman Nasional Lore Lindu. Pasca pengakuan antara masyarakat dan Balai Taman Nasional Lore Lindu, lembaga adat kembali berdaya dalam mengelola sumberdaya lahan dan hutan. Mulai dari pemanfaatan lahan dan hasil hutan hingga pengawasan terhadap wilayah hukum adat menjadi kewenangan lembaga adat Toro. Mereka mendefinisikan kesepakatan tersebut sebagai bentuk simbolisasi “kebebasan” dalam memanfaatkan hasil hutan kayu dan non kayu untuk berbagai tujuan. Banyaknya alasan yang dikemukakan ilegal logging, mereka tetap dianggap melanggar oleh pihak lembaga adat dan layak dijatuhi hukuman sanksi adat.

Meskipun kasus-kasus tersebut diselesaikan melalui mekanisme adat, namun tata cara adat yang dimaksud berbeda dengan tata cara yang pernah dilakukan pendahulu mereka, di mana oknum yang melakukan pelanggaran

seharusnya disidang di muka para tetua adat, dan disaksikan oleh utusan-utusan lembaga yang ada di Toro. Namun faktanya, penyelesaian kasus hanya ditangani oleh salah seorang *Totua ngata*, dan tidak melibatkan unsur lain.

Dalam musyawarah tersebut mengemuka sejumlah isu krusial di antaranya: struktur dan komposisi lembaga adat yang terkesan dibatasi; tidak adanya struktur dan pola-pola hubungan yang jelas antar lembaga; serta tidak dimilikinya aturanaturan baku terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Toro. Pertemuan ke tiga, pada tanggal 25–30 Oktober 2003. Kegiatan ini dihadiri oleh 80 utusan dari tiap lembaga dan dusun yang ada di Toro. Berbeda dengan dua pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ketiga menyerupai kegiatan workshop, merumuskan rancangan struktur kelembagaan dan terkait pemanfaatan sumberdaya alam di Toro. Struktur pemerintahan desa terdiri dari:

1. Pemerintah desa (pemerintah *ngata*),
2. Lembaga Masyarakat Adat (LMA),
3. Lembaga Perwakilan *Ngata* (LPN).

Ketiga lembaga ini berkedudukan sejajar dalam struktur organisasinya. Faktor yang membedakan ketiganya terletak pada fungsi dan perannya masing-masing. Selain itu berhasil disusun rencana strategis (Renstra) Toro untuk lima tahun kedepan (tahun 2003-2008). Dalam renstra tersebut memuat visi (*antoa*) masyarakat Toro: “*terwujudnya kebersamaan ngata untuk kehidupan yang harmonis dengan alam dan berkelanjutan (Hintuwu ngata molingku katuwua)*”. Sedangkan misi termuat dalam renstra:

1. Memelihara dan mempertahankan adat secara konsisten;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan tingkat perekonomian masyarakat; dan

3. Membangun solidaritas perjuangan masyarakat adat antar desa. Renstra inilah yang dijadikan acuan pembuatan draft peraturan desa (Perdes) Toro, yang di dalamnya mengatur sistem pemerintahan yang baru di Toro.

Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan SDA harus menjaga kearifan tradisional, di antaranya kecermatannya dalam memperhatikan musim, tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan, memperhatikan kemiringan lahan, serta tidak mengganggu mata air yang berada di dekatnya. Izin dikeluarkan apabila tujuan pemanfaatan semata-mata untuk kebutuhan domestik, seperti bangunan sosial, ramuan rumah, perabot dapur, dan alat-alat pertanian. Namun dalam perkembangannya, saat ini telah diperkenankan pula memanen kayu untuk kebutuhan bahan baku industri meubel dan kusen berskala lokal.

Tujuan utama Balai Taman Nasional Lore Lindu adalah melayani masyarakat untuk prospek dan kontribusi terhadap pembangunan di daerah.

1. Kepemilikan lahan dan pengelolaan hasil hutan (kayu, rotan, gaharu dan damar), dan perburuan hewan yang dilindungi (anoa dan babi rusa), yang tidak berdasarkan kebijakan hukum adat, dikenakan sanksi berupa; *tolu ungu*, *tolu mpulu*, *tolu ngkau* (tiga ekor hewan kerbau atau sapi, tigapuluh *dulang* / piring, dan tiga lembar kain *mbesa* / kain adat), nilainya bisa mencapai lima juta rupiah.
2. Penambangan yang tidak berdasarkan hukum adat, dikenakan sanksi adat berupa *pitu ongu*, *pitu mbulu*, *pitu ngkau*, (tujuh ekor hewan kerbau/sapi, tujuh puluh *dulang* dan tujuh lembar kain *mbesa* / kain adat). Jika dirupiahkan nilainya sebelas juta rupiah.
3. Penangkapan ikan yang menggunakan bahan kimia beracun, stroom listrik atau sejenisnya yang dapat merugikan keberlanjutan dan kelestarian jenis-jenis.

Wewenang Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Hutan ;

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah ( untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lainnya), persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan baru dll), dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada subyek tertentu);
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan dll);

Wewenang masyarakat adat tidak sekedar atas obyek tanah, tetapi juga atas obyek-obyek sumber daya alam lainnya yaitu semua yang ada di atas tanah (pepohonan, binatang, bebatuan yang memiliki makna ekonomis); didalam tanah bahan-bahan galian) dan juga sepanjang pesisir pantai, juga diatas permukaan air, di dalam air maupun bagian tanah yang berada didalamnya.

### **III.PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Hutan di Taman Nasional Lore Lindu tetap di perkenankan terutama dalam hal pemanfaatan kulit kayu pohon beringin sebagai bahan baju adat (kain fuya). Untuk mendapatkan kulit kayu masyarakat tidak diperbolehkan menebang pohon beringin demi menjaga kestabilan sumber daya alam dan perubahan hidupnya.
2. Pada prinsipnya masyarakat adat tetap di lindungi dan mempunyai hak untuk mengelola sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diakui keberadaannya.

**B. Saran**

1. Masyarakat adat Toro dalam mengelola Sumber Daya Hutan hendaknya ikut menjaga, melestarikan dan memberikan solusi terbaik agar ekosistem di Taman Nasional Lore Lindu tetap terjaga kelestariannya demi untuk menjaga nilai-nilai kearifan Lokal masyarakat adat Toro.
2. Pemberian izin Pengelolaan Hutan Taman Nasional Lore Lindu tersebut haruslah sesuai dengan alasan yang dikemukakan si pemohon, berdasarkan prinsip-prinsip kearifan tradisional.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdurahman dan Wentzel, *Konsep Untuk Menyelesaikan Masalah Status Tanah Masyarakat Adat Di Indonesia*, Kawasan Hutan Pada Areal HPH dan HPHTI di Propinsi Kaltim, 1999.
- Safitri Myrna, Kusworo,A & Bediona Philipus. *Peran Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan: Kajian Kebijakan Daerah Lampung*, Kaltim dan NTT P3AE-UI, Jakarta, 1997.
- Suhardjito Didik, Khan Azis, Djatmiko Wibowo, Sirait Martua dan Evelynsanti.
- Sumadjono M, *Pengakuan Keberadaan Hutan Adat Dalam Rangka Reformasi Agraria Lokakarya Keberadaan Hutan Adat, KR Kehutanan dan Perkebunan*, Jakarta, 25 Maret 1999

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

**BIODATA PENULIS**



**NAMA : VAYKA ABDULLAH**  
**TTTL : MANADO, 25 NOVEMBER 1989**  
**ALAMAT : JLN.DURIAN NO. 17**  
**ALAMAT E-MAIL : vaykaattamimi@yahoo.com**  
**NO.TELP : 085298774440**